

Melompat Lebih Tinggi untuk Mencapai Komitmen Iklim Indonesia di Sektor Kehutanan

Muhammad Teguh Surya

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan


IESR, 16 September 2019

FGD Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang Ambisius di Indonesia:

Rekomendasi Posisi Indonesia untuk UN Climate Action Summit



#TemenanLagi untuk #IndonesiaTangguh



Di sektor kehutanan, dokumen NDC Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara berhutan lainnya

Makna target NDC untuk hutan Indonesia

Menunjukkan target penurunan emisi yang **jelas dan spesifik**, baik yang tanpa syarat maupun bersyarat

Penurunan emisi 70% dari target BAU 2030 atau 66% dari emisi historis 2010 (tanpa syarat)

Penurunan emisi 90% dari target BAU 2030 atau 82% dari emisi historis 2010 (bersyarat)

Pada 2021-2030, tiap tahunnya Indonesia masih boleh mendeforestasi seluas **325.000 ha**

Jika tidak tercapai, kerusakan hutan akan lebih luas lagi

Deforestasi seluas negara Belgia pada 2030 bahkan **JIKA** seluruh kebijakan NDC berhasil diterapkan



Akankah kita mencapai komitmen iklim 2030?

UN Emission Gap Report 2017

Tidak tersedia cukup informasi untuk menentukan apakah Indonesia akan mencapai komitmen iklimnya. Proyeksi pemerintah berlandaskan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini tidak tersedia.

WRI 2018

Jika Indonesia menerapkan seluruh kebijakan yang ada saat ini, emisi dari sektor lahan dan energi akan melampaui komitmen tanpa syarat sebesar 29%.

Di sektor penggunaan lahan pun dibutuhkan penguatan kebijakan (*strengthened measures*)

AKSI MITIGASI UNTUK PENCAPAIAN TARGET NDC

Sumber: Presentasi Dirjen PPI pada Rakernas LHPI dan PNPI 2017, 4 Agustus 2017



Energi

- Efisiensi Penggunaan Energi Final (75 % dilaksanakan)
- Pemanfaatan Teknologi *Clean Coal technology* - CCT (75 % dilaksanakan)
- Produksi Listrik EBT (sesuai RUPTL)
- Penggunaan bahan bakar nabati - BBN (Mandatory B30) pada Sektor Transportasi (90 % dilaksanakan)
- Penambahan Jaringan Gas (100 % dilaksanakan)
- Penambahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas - SPBG (100 % dilaksanakan)



Kehutanan

- Penurunan deforestasi* (< 0,45 ha- 0,325 Mha/tahun di 2030).
- Peningkatan penerapan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan, baik di hutan alam (penurunan degradasi) maupun di hutan tanaman*.
- Rehabilitasi 12 juta ha lahan terdegradasi pada tahun 2030 atau 800,000 ha/tahun dengan survival rates sebesar 90%.
- Restorasi 2 juta ha gambut pada tahun 2030 dengan tingkat kesuksesan sebesar 90%. (Catatan: * berada di bawah skema REDD+



Pertanian

- Penggunaan varietas rendah emisi di lahan sawah
- Penerapan sistem pengairan sawah lebih hemat air.
- Pemanfaatan limbah ternak untuk biogas.
- Perbaiki suplemen pakan.



Limbah

- Pengelolaan limbah padat (solid waste)Pengelolaan limbah cair industri (target kuantitatif masih perlu ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan KLHK).
- Pengelolaan limbah cair domestik (target kuantitatif masih perlu ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kesehatan).
- Peningkatan penerapan *landfill gas (LFG) recovery* dari 2010-2030 dalam pengelolaan TPA.
- Peningkatan persentase pemanfaatan sampah melalui composting and 3R (paper).
- Peningkatan persentase PLTSa/RDF (*Refuse Derived Fuel*), dibandingkan dengan total timbulan sampah.



IPPU-industrial processes and product use

- Industri semen melaksanakan aksi mitigasi melalui pengurangan "*clinker to cement ratio*" (*blended cement*) dari 80% di 2010 menjadi 75% di 2030.
- Peningkatan efisiensi industri amonia melalui optimasi pemanfaatan gas bumi (*feedstock*) dan *CO₂ recovery* pada *Primary Reformer*.
- Penambahan aksi mitigasi lainnya seperti *CO₂ recovery*, *improvement process* pada *smelter*, dan pemanfaatan besi bekas (*scrap*) pada industri besi dan baja serta sisa klaim

Kebijakan yang ada saat ini – ke mana arah pelaksanaannya?

Inpres 5/2019

Moratorium hutan

Penghentian Izin Baru di Hutan Primer dan Lahan Gambut (2019)

1. Mengandung lebih banyak pengecualian dibandingkan Inpres sebelumnya
2. Belum mencakup hutan alam sekunder yang tidak termasuk Hutan Konservasi dan Hutan Lindung
3. Area yang dilindungi masih bisa berkurang karena PIPPIB direvisi tiap 6 bulan
4. Masih ada tumpang tindih dengan konsesi sawit (1 juta ha)
5. Tidak ada mandat review izin di hutan primer dan lahan gambut

Perpres 1/2016
 PP 57/2016
 P.14/2017
 P.15/2017
 P.16/2017
 P.10/2019



Restorasi Gambut

Restorasi Gambut 2016-2020 and beyond (?)

Inpres 8/2018

Moratorium sawit

Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit (2019-2021)

1. Restorasi di wilayah konsesi perusahaan belum banyak kemajuan – terjadi kebakaran berulang di wilayah perusahaan2 yang sama tanpa penindakan hukum
2. Kelanjutan pasca-BRG selesai tahun 2020
3. Permen Kubah Gambut yang melemahkan (P10/2019)

1. Cukup progresif karena memerintahkan evaluasi izin sawit di kawasan hutan dan yang masih memiliki tutupan hutan, namun
2. Masih ada pengecualian izin (kasus Buol)
3. Implementasi lambat dan tertutup
4. Potensi pemutihan tinggi (RUU Pertanahan)

Gambaran Besar

1. Komitmen dan kepemimpinan politik Presiden (?)
2. Penekanan pada infrastruktur dan investasi, pelonggaran izin, pelemahan KPK, dll.

Rekomendasi Aksi

1. Memperluas kebijakan penghentian izin baru hingga mencakup hutan sekunder dan menutup pengecualian terkait permohonan izin lama
2. Meninjau ulang dan mencabut izin kehutanan, perkebunan sawit, dan tambang di wilayah hutan alam dan gambut
3. Meningkatkan target restorasi gambut dan memperkuat penegakan hukum di wilayah konsesi
4. Mempercepat realisasi perhutanan sosial dan pemulihan lingkungan di wilayah perhutanan sosial, termasuk rehabilitasi hutan dan lahan

Jangan lupa gambaran besar

1. Interkoneksi target mitigasi energi dan lahan: emisi dari sektor energi diperkirakan akan menyalip lahan, solusi di satu sektor bisa menimbulkan tekanan pada sektor lain.
2. Perlu satu kebijakan/aturan terintegrasi yang dapat menyatukan kebijakan-kebijakan yang saat ini terpisah-pisah
3. Komitmen dan kepemimpinan politik Presiden adalah syarat mutlak
4. RUU Pertanahan, pelemahan KPK



INDONESIA ADALAH KOENTJI



"Bantu kitong minta Presiden Indonesia untuk permanenkan perlindungan hutan Indonesia."

Piter Masakoda
Ketua Himpunan Pemuda Moskona
Papua Barat

DUKUNG PACE PITER LINDUNGI

**43 JUTA HEKTARE HUTAN INDONESIA
DARI PNEBANGAN**

CHANGE.ORG/LINDUNGIHUTAN



Madani

Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.

- 🌐 www.madaniberkelanjutan.id
- 📷 [@madaniberkelanjutan.id](https://www.instagram.com/madaniberkelanjutan.id)
- 🐦 [@yayasanmadani](https://www.twitter.com/yayasanmadani)
- 📍 Madani Berkelanjutan

YAYASAN MADANI BERKELANJUTAN
Jalan Pejaten Raya, Komplek Depdikbud Blok B4/21
Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520
(021) 27871925

Catatan Kritis
Inpres No. 5 Tahun 2019 tentang
Penghentian Pemberian Izin Baru
dan Penyempurnaan Tata Kelola
Hutan Alam Primer dan
Lahan Gambut

Agustus 2019

Yayasan Madani Berkelanjutan